e-ISSN 2798-8961

Hita Akuntansi dan Keuangan
Universitas Hindu Indonesia
Edisi Januari 2023

Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada Bumdesa Paksebali Desa Paksebali Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung)

Ni Luh Gede Suastini [(1)]
I Putu Fery Karyada [(2)]
[(1)(2)]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sangalangit, Tembau, Penatih, Kota Denpasar, Bali
e-mail: luhde3559@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the efficiency and effectiveness of the financial management of the Paksebali Village Owned Enterprise (BUMDesa) in Paksebali Village, Dawan District, Klungkung Regency. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative analysis with efficiency ratios and effectiveness ratios. The results the study are based on guidelines unit on the effectivenessof the BUMDesa financial management from t2017 to 2020 on average above 90%, this means that the Paksebali BUMDesa financial managements is included in the effective category. The results of measuring the efficiency level of Paksebali BUMDesa financial management efficiency levels from 2017 to 2020 are included in the inefficient category, this is because Paksebali BUMDesa expenditures are still very high compared to the total revenue from BUMDesa business units. Expenditures that are still very high based on research results occurred in 2019 – 2020 due to the impact of the Covid – 19 pandemic. Paksebali BUMDesa should first calculate the allocation of cost to costs to be incurred, so that there is no waste in financial management in the following year.

Keywords : *Efficiency, Effectiveness, Financial Management of village - owned enterprises*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki struktur terkecil dari pemerintahan yaitu Desa. Desa adalah suatu kesatuan hukum yang didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutardjo Kartohadikusumo, 1953). Terkait dengan desa, pemerintah sudah mengesahkan peraturan yang mengatur tentang pemerintahan desa pada Undang – Undang No. 6 Tahun 2014. Dengan peraturan ini, pemerintah desa kini dapat sepenuhnya mandiri dalam mengelola dan membangun pemerintahannya.

Program pemerintah yang ditujukan guna meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan telah berlangsung cukup lama. Dengan memajukan kesejahteraan warganya dan masyarakat luas, pemerintah dituntut untuk menumbuhkan iklim usaha yang mendorong pembangunan ekonomi yang sehat dan membantu dalam membangun ekonomi nasional yang kuat. Membangun bisnis milik desa yang sepenuhnya diatur oleh masyarakat lokal adalah salah satu strategi yang memungkinkan untuk merangsang pembangunan ekonomi di daerah pedesaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang "Badan Usaha Milik Desa diberlakukan oleh pemerintah, Desa yang mengikuti program BUMDes mampu menjaga vitalitas ekonominya sekaligus meningkatkan potensi asli masyarakat"

Perkembangan BUMDesa di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) jumlah BUMDesa meningkat signifikan dimana pada tahun 2014 hanya terdapat 1.022 unit dan pada tahun 2021 tercatat ada 57.273 unit BUMDesa dengan rincian BUMDesa yang aktif sebanyak 45.233 unit dan BUMDesa yang tidak aktif di Indonesia sebanyak 12.040 BUMDesa (Waseso, 2021). Di Indonesia, tepatnya di Provinsi Bali hingga tahun 2020 telah tercatat 636 desa terdapat 588 unit BUMDesa (Novelino, 2021). Namun dengan berkembangnya BUMDesa yang cukup pesat di Provinsi Bali, sampai saat ini banyak BUMDesa yang mengalami kerugian dalam pengelolaan keuangan yang disebabkan oleh belum dikelola secara profesional, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan BUMDesa.

Menurut (Robbins & Mary, 2009) "Guna mendapatkan hasil maksimal dari pengeluaran minimal Efisien penggunaan sumber daya menghemat uang dan waktu, serta memaksimalkan penggunaan semua sumber daya yang tersedia sehingga tidak ada yang terbuang, membuat efisiensi penting". Terdapat dua cara untuk mengukur efektivitas pengelolaan keuangan dari usaha dan hasil. Semakin besar jumlah usaha

yang dimasukkan ke dalam suatu kegiatan, semakin efektif dalam hal keberhasilan atau kegagalan.

Pada Kabupaten Klungkung memiliki perkembangan BUMDesa yang cukup pesat, dari 53 desa telah membentuk BUMDesa sebanyak 48 unit. Namun banyaknya permasalahan yang dihadapi BUMDesa di Kabupaten Klungkung dalam beberapa tahun terakhir yaitu berawal dari administrasi yang masih kacau dan BUMDesa yang tidak dikelola secara profesional. Mengantisipasi ditemukan tindakan pelanggaran hukum di masa mendatang, Inspektorat Daerah Klungkung akan fokus pada pembenahan pengelolaan keuangan BUMDesa pada tahun 2021 (Suputra, 2020).

Paksebali adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung dan memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang bernama BUMDesa Paksebali. Keberadaan BUMDesa di Desa Paksebali sangat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Paksebali. Unit yang dilaksanakan BUMDesa Paksebali diantaranya unit pengelola air minum (PAM Desa), unit usaha simpan pinjam, unit usaha penanganan sampah, unit usaha obyek wisata dan unit usaha pasar desa.

Lemahnya kondisi pengelolaan keuangan yang dihadapi BUMDesa Paksebali yang mengakibatkan salah satu unit usaha pengelola air minum (PAM Desa) yang mengalami kerugian sampai tahun 2019. Pada tahun 2020 unit usaha obyek wisata mengalami kerugian akibat pemasukan yang tidak mampu memenuhi biaya operasional (Mustofa,2021). Hal ini disebabkan karena kurang efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan BUMDesa Paksebali. Keteraturan, kepatuhan, efisiensi, efektivitas, keterbukaan, dan tanggung jawab adalah semua persyaratan untuk pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan sebaik mungkin, karena seringkali gagal memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pemaparan diatas dan fenomena BUMDesa Paksebali di Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, peneliti tertarik mengkaji penelitian berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha

Milik Desa (Studi kasus pada BUMDesa Paksebali Desa Paksebali Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung)".

Berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu bagaimanakah efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDesa Paksebali di Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung?"

Dari rumusan tersebut tujuan penelitian ini yaitu "mengetahui efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDesa Paksebali di Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung"

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini harus memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta memperluas pengetahuan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan dapat ditambahkan ke dalam daftar pustaka akademik sebagai acuan penelitian selanjutnya
2. Manfaat Praktis

   Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Paksebali di Desa Paksebali, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan BUMDesa.

KAJIAN PUSTAKA

Desa

Pasal 1(1) UU No 6 Tahun 2014 mendefinisikan "desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang mempunyai kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Diakui dan dihormati oleh pemerintah Indonesia atas kontribusinya".

Badan Usaha Milik Desa

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan membangun kohesi sosial sesuai dengan tuntutan dan potensi lokal, desa telah mendirikan BUMDesa (Maryunani, 2008). Sehingga, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa pengelolaan entitas perusahaan berjalan dengan sukses dan efisien serta profesional. BUMDes yang taat hukum menjalankan fungsi ekonomi dan pemerintahan. BUMDes melayani dua tujuan utama: sebagai tempat pertemuan sosial dan sebagai pusat perdagangan desa.

Teori Stewardship

Pembelajaran pengelolaan (*Stewardship Theory*) yang menjelaskan penelitian sebagai hasil dari teori agensi yaitu *stewardship theory*. (Donaldson et al, 1997). Teori ini mempelajari situasi dimana manajemen tidak dimovitasi oleh tujuan individu tetapi berfokus pada hasil utama untuk kepentingan organisasi. Teori ini berarti bahwa ada hubungan yang baik antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. Teori *stewardship* dianggap lebih tepat untuk diterapkan di organisasi BUMDesa. Kajian ini dinilai berpotensi menjelaskan bahwa pimpinan (pengelola) BUMDesa dalam mengelola BUMDesa akan mengesampingkan kepentingan pribadinya dan memaksimalkan kinerjanya untuk mencapai tujuan BUMDesa. Dalam pengelolaan keuangan, BUMDesa tentunya ingin memberikan akuntabilitas yang sebaik – baiknya kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori *stewardship* untuk menjelaskan bagaimana para pengelola BUMDesa berupaya mencapai pengelolaan keuangan yang baik.

Pengelolaan Keuangan

Menurut Arikunto (1993), kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang juga berarti pengaturan atau pengurusan. “Manajemen dikatakan sebagai proses perencanaan dan pengambilan keputusan, keputusan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian organisasi sumber daya manusia, keuangan, material dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara tepat waktu, efisien dan efektif” (Griffin,

1990). Dalam pengelolaan keuangan BUMDesa terdapat tahapan - tahapan dari rangkaian siklus kegiatan sebagai berikut (Bihamding, 2019) :

1. Perencanaan

   Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan pengeluaran untuk suatu periode dimasa mendatang.

2. Pelaksanaan

   Implementasi pengelolaan keuangan BUMDes mengacu pada proses di mana bisnis menjalankan anggaran pendapatan mereka.

3. Penatausahaan

   Pengelolaan kegiatan administrasi di sektor keuangan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sektor keuangan sesuai dengan prinsip, aturan, dan proses tertentu untuk mengumpulkan segera informasi faktual tentang pasar keuangan..

4. Pelaporan

   Yaitu tindakan guna mengkomunikasikan hasil pekerjaan suatu periode waktu tertentu sebagai sarana pemenuhan tanggung jawab dan wewenang seseorang.

5. Pertanggungjawaban

   Direktur pengelola BUMDesa memberikan laporan pembukuan capaian BUMDesa kepada Kepala Desa. Yang wajib dilaporkan setiap tahun.

Penelitian Sebelumnya

Penelitian – penelitian terdahulu sangat berperan pada penelitian ini, sebagai seorang peneliti harus mengacu pada penelitian – penelitian terdahulu yang relevan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa sebagai berikut :

Ahmad, dkk.,(2020) melakukan penelitian yang menganalisis efisiensi dan efektivitas keuangan desa/nagari di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hasil yang diperoleh adalah rata – rata kinjerja keuangan nagari Kbaupaten Tanah Datar tahun 2015 – 2017 menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan nagari dengan perbandingan antara realisasi pengeluaran dan pendapatan berada pada tungkat rata –

rata 92,90% atau tidak efektif sedangkan tingkat efektivitas tahun 2015 – 2017 menunjukkan keuangan nagari rata – rata 83,41% atau cukup efektif.

Susanti, dkk.,(2020) melakukan penelitian yang menganalisis tentang "pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aeeropa di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Aerropa belum berjalan dengan baik, dikarenakan adanya pengaruh keadaan sumber daya keuangan, manusia dan alam yang kurang memadai didalam pembentukan Aerropa sebagai BUMDes.

Kusrawan (2021) melakukan penelitian yang menganalisis "efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe". Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh tingkat efisiensi pengelolaan dana 2019 tidak efisien yaitu 100%, kategori tidak efisien sedangkan tingkat efektivitas pengelolaan dana desa 2019 sebesar 99% yang dikategorikan efektif, menggambarkan tingkat keberhasilan desa dalam tata kelola dana dari pembangunan desa.

Kadang, et al.,(2021) melakukan penelitian yang menganalisis "efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sudah cukup efektif. Namun masih perlu ditingkatkan dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar mendapatkan dukungan seluruh warga desa Meko.

Tenda, et al., (2022) melakukan penelitian yang menganalisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance* Desa Tounelet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Hasil ini menggambarkan pengelolaan keuangan yang dilakukan BUMDes Tounelet dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausaha dan pertanggungjawaban masih bersifat sederhana dan masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Gambar 3.1

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Paksebali Desa Paksebali Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung

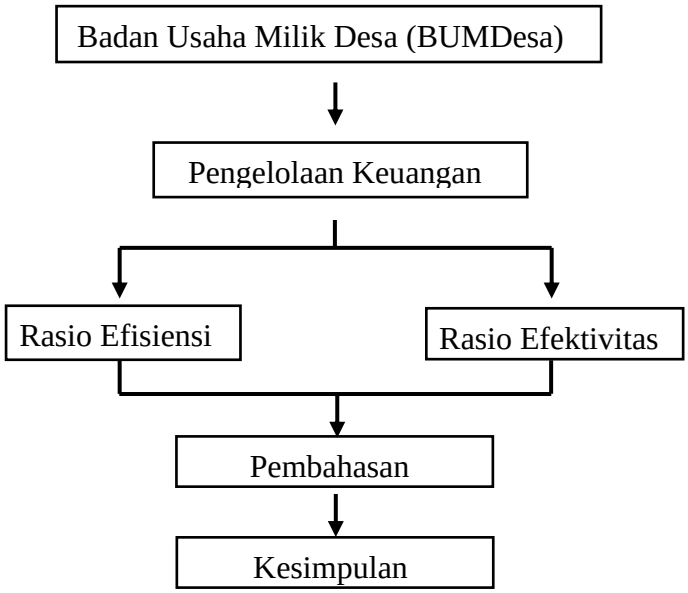

Sumber : Hasil Pemikiran Peneliti (2022)

Dalam desain penelitian ini dimaksudkan dapat menganalisis pengelolaan keuangan BUMDesa Paksebali menggunakan analisis efisiensi dan efektivitas serta rasio – rasio untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan BUMDesa Paksebali.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui akan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan pada BUMDesa Paksebali. Setelah memperoleh data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data dan mendeskriptifkan data tersebut dalam bentuk kalimat – kalimat yang tersusun secara

rinci dan memberikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan adanya instrumen penelitian untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan BUMDesa Paksebali sebagai berikut :

1. Metode Analisis Efisiensi

   Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dengan masukan dengan satuan masukan/ keluaran lainnya (Mahmudi, 2007). Analisis efisiensi pengelolaan keuanga dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran biaya pemerolehan pendapatan dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \text{ X } 100\%$$

   Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan BUMDesa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam No. 690.900-327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan

No	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1.	100% ke atas	Tidak efisien
2.	90 – 100%	Kurang efisien
3.	80 – 90%	Cukup efisien
4.	60 – 80%	Efisien
5.	Kurang 60%	Sangat efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997

2. Metode Analisis Efektivitas

   Efektivitas hanya hasil yang melihat suatu program/kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo,2004:134). Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat

perbandingan antara target pendapatan dengan realisasi pendapatan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \text{ X } 100\%$$

Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan BUMDesa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam No. 690.900-327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kriteria Kinerja Efektivitas Keuangan

No	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1.	100% ke atas	Sangat efektif
2.	90 – 100%	Efektif
3.	80 – 90%	Cukup efektif
4.	60 – 80%	Kurang efektif
5.	Kurang 60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan Keuangan BUMDesa Paksebali

BUMDesa di Paksebali berawal pada 17 Juni 2014, dengan struktur kepengurusan BUMDesa terdiri atas Direktur, Manager, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit Usaha dan Karyawan. Pendanaan BUMDesa berasal dari beragam sumber pemerintah dan Gerbang Sadu Mandara Provinsi Bali yaitu Rp. 1.020.000.000,-.

Pengelolaan keuangan BUMDesa Paksebali yaitu dalam tahap perencanaan keuangan BUMDesa disiapkan oleh Direktur dan staf pengelola BUMDesa untuk dibahas dan disepakati bersama. Hasil wawancara oleh Direktur BUMDesa Paksebali mengatakan "*perencanaan keuangan unit usaha BUMDesa disusun sebelum tiga bulan tutup buku dan disetujui tokoh masyarakat serta disahkan oleh Kepala Desa*".

BUMDesa melakukan perencanaan mulai tahun 2017, agar mampu mencapai target – target yang direncanakan. Tahap pelaksanaan berpedoman pada rencana kerja anggaran (RKA) yang telah disusun pada tahap perencanaan. Modal awal diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali kepada pengurus BUMDesa, Direktur BUMDesa Paksebali mengatakan "*bahwa modal awal dari provinsi Bali dipergunakan dalam pembentukan operasional BUMDesa sebesar Rp. 20.000.000,- lalu dana sebesar Rp. 200.000.000,- digunakan untuk sanitasi unit usaha PAM Desa dan sisa dari dana tersebut digunakan untuk menjalankan unit usaha BUMDesa".*

Tahap penatausahaan dilakukan oleh pembukuan masing – masing unit usaha BUMDesa dengan masih sangat sederhana, pencatatan penerimaan dan pengeluaran hanya dicatat secara sederhana. "*Setiap pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat di buku besar dan bukti transaksi di tulis secara manual*", kata Ibu Susanti selaku pembukuan unit usaha PAM Desa. Kemudian tahap pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggungjawab atas penggunaan dana yang telah dipercayakan kepada pengurus BUMDesa Paksebali. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Direktur BUMDesa Paksebali mengatakan "*bahwa laporan keuangan yang telah saya susun kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa dan masyarakat dengan membawa berkas – berkas yang dibutuhkan sebagai bukti adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran*".

Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan BUMDesa Paksebali

Jika melihat efisiensi pengelolaan keuangan BUMDes Paksebali, jelas terlihat bahwa rumus perhitungannya adalah rasio biaya pendapatan terhadap pendapatan yang direalisasikan, dan semakin rendah rasionya, semakin baik. Memastikan kelancaran operasional sumber daya keuangan BUMDesa.

Tabel 4.1

Rasio Efisiensi Seluruh Unit Usaha BUMDesa TA 2017 – 2020

Tahun	Biaya Pemerolehan Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2017	1.136.279.656	1.182.350.453	96,10	Kurang Efisien
2018	1.581.831.396	1.601.657.336	98,76	Kurang Efisien
2019	1.493.001.616	1.467.497.798	101,74	Tidak Efisien
2020	1.057.176.000	975.553.000	108,37	Tidak Efisien
Rata – rata rasio			101,24	Tidak Efisien

Sumber : LK BUMDesa PakseBali, 2022 (Data Diolah).

Dari hasil data diatas, dapat disimpulkan tingkat rata – rata rasio efisiensi seluruh unit usaha BUMDesa sebesar 101,24% pada efisiensi berdasarkan ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 690.600-327 tahun 1996 tentang "kriteria penilaian dan kinerja keuangan yang menyatakan bahwa, apabila tingkat efisiensi atau hasil perbandingan antara biaya pemerolehan pendapatan dengan realisasi pendapatan mencapai angka >100%, maka dapat dikatakan kategori Tidak Efisien." Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengelola keuangan BUMDesa dari unit usaha PAM Desa, Penanganan Sampah, Obyek Wisata dan Pasar Desa memiliki fasilitas infrastruktur dengan biaya pemeliharaan mahal. Efisiensi organisasi lebih berfokus pada kapasitasnya untuk memenuhi tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif.

Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan BUMDesa Paksebali

Tingkat efektivitas keuangan BUMDesa Paksebali tergambar dari rumus perhitungannya adalah perbandingan antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan.

Tabel 4.2
Rasio Efektivitas Seluruh Unit Usaha BUMDesa TA 2017 – 2020

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2017	1.182.350.453	924.750.463	127,86	Sangat Efektif
2018	1.601.657.336	1.285.020.748	124,64	Sangat Efektif
2019	1.467.497.798	1.886.176.291	77,80	Kurang Efektif
2020	975.553.000	1.921.271.487	50,78	Tidak Efektif
Rata – rata rasio			95,27	Efektif

Sumber : RKA dan LK BUMDesa Paksebali, 2022 (Data Diolah)

Dari hasil data diatas, analisis efektivitas tahun anggaran 2017 hingga tahun 2020 memiliki tingkat rata – rata rasio efektivitas seluruh unit usaha BUMDesa sebesar 95,27%. Dianggap efektif jika rasio pendapatan aktual terhadap pendapatan tujuan adalah 90-100 persen, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 1. 690.600-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Pengawasan Kinerja Keuangan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat efektivitas pengelolaan keuangan BUMDesa Paksebali telah mencapai sasaran dalam menargetkan pendapatan dan merealisasikannya.

PEMBAHASAN

Efisiensi Pengelolaan Keuangan BUMDesa Paksebali

Efisiensi Pengelolaan Keuangan BUMDesa Paksebali masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat rata – rata rasio efisiensi seluruh unit usaha BUMDesa tahun anggaran 2017 hingga tahun 2020 yang dikategori Tidak Efisien. Kemampuan keuangan dan prioritas pendanaan BUMDes tidak diperhitungkan dengan cermat dalam mengalokasikan dana untuk mendukung pengembangan dan kegiatannya, yang mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien (Yunianti, 2015). Adapun beberapa unit usaha BUMDesa yang tidak efisien dalam

pengelolaan keuangannya unit usaha PAM Desa yang memiliki fasilitas infrastruktur dan biaya pemeliharaan yang cukup mahal, hal ini menyebabkan unit usaha ini mengalami kerugian dan ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan di tahun 2017 hingga 2019. Tahun 2020, unit usaha ini melakukan pembenahan dalam penggunaan sumber daya manusia yaitu memberikan pengarahan cara pengecekan water meter (WM) yang benar. Dengan adanya pembenahan tersebut, pengelolaan keuangan BUMDesa pada unit usaha PAMDesa kini mulai memberikan keuntungan mencapai Rp. 41.519.402,- walaupun pada masa pandemi Covid – 19.

Unit usaha penanganan sampah yang penggunaan sumber daya manusia sebanyak 28 orang ini menyebabkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan cukup besar, sehingga unit usaha ini dikategorikan sebagai lembaga sosial oleh Direktur BUMDesa Paksebali. BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial (Atmojo, 2017).

Unit usaha obyek wisata yang di tahun 2017 hingga 2019 memiliki sumber daya manusia sebanyak 17 orang, hal ini menimbulkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang cukup besar namun unit usaha ini tetap memperoleh keuntungan mencapai Rp. 92.944.483,-. Tahun 2020, unit usaha ini terkena dampak dari pandemi Covid–19, sehingga usaha ini ditutup sementara dan dibuka kembali jika adanya reservasi dari masyarakat yang ingin menyewa tempat untuk kegiatan prawedding, dan lain sebagainya.

Unit usaha simpan pinjam di tahun 2020 terkena dampak dari pandemi Covid–19 yang menyebabkan biaya operasional yang cukup besar dikarenakan pendapatan dari usaha ini sangat kurang optimal, kemudian dengan adanya kebijakan dari direktur BUMDesa Paksebali yang meringkankan masyarakat dengan membayarkan pokok dari pinjamannya ataupun bunga dari pinjaman masyarakat.

Unit usaha pasar desa dari tahun 2017 hingga 2020 memiliki fasilitas infrastruktur yang biaya pemeliharaan cukup mahal, namun usaha ini tetap memperoleh keuntungan, walaupun pada masa pandemi Covid -19.

Dari lima unit usaha yang dijalankan BUMDesa Paksebali seharusnya dalam menyusun anggaran wajib meninjau efisiensi penggunaan dana (Trianto,2016). Betapa pentingnya BUMDesa melakukan optimasi perencanaan penganggaran yang kian efisien atas sumber daya internal yang dimiliki, sehingga dana mampu kian diserap optimal (Meiriki et al,2020).

Efektivitas Pengelolaan Keuangan BUMDesa Paksebali

Efektivitas pengelolaan keuangan BUMDesa Paksebali dari tahun anggaran 2017 hingga tahun 2020 dapat dikatakan Efektif, semakin besar kemajuan yang diperoleh ke arah tujuan, maka organisasi menjadi semakin efektif (Makmur, 2008:120). kemampuan seseorang untuk bekerja dalam situasi ketika tidak ada krisis waktu atau konflik antara bagian-bagian pekerjaan yang berbeda. (Kurniawan,2005:109). Namun keberhasilan mencapai target pendapatan BUMDesa, ada aspek yang wajib ditinjau dari laporan keuangan ialah BUMDesa seharusnya dapat mengatur penerimaan pendapatan, agar dapat menyesuaikan dengan biaya rutin yang dikeluarkan sehingga pengelolaan keuangan BUMDesa dapat diatur dan efisien (Syahril, et al.,2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis mengenai penelitian diatas, disimpulkan :

1. Rata – rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan BUMDesa Paksebali di Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dikategorikan tidak efisien akan tetapi ada perkembangan, dikarenakan dilihat dari pengelolaan keuangan BUMDesa Paksebali masih sangat lemah, Alokasi uang untuk BUMDes harus diperhitungkan dengan lebih hati-hati di tahun mendatang untuk memastikan

kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk penghematan biaya, dan BUMDesa Paksebali harus dapat mengelola dana dengan baik.

2. Sedangkan hasil dari tingkat rata – rata efektivitas seluruh unit usaha BUMDesa dikategorikan Efektif. Memperhatikan dari hasil ini, Pertimbangkan terlebih dahulu efisiensi alokasi keuangan yang akan ditangani untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan tujuan perluasan unit bisnis.

Berdasarkan uraian diatas, terkait penelitian maka saran yang dapat diberikan kepada BUMDesa Paksebali di Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yaitu :

1. Pengunaan sumber daya seperti tenaga kerja pada BUMDesa Paksebali dilibatkan dalam pelaksanannya dan pihak BUMDesa perlu memberikan pelatihan kepada pegawai yang berasal dari masyarakat desa dengan memfokuskan kepada pelatihan yang lebih professional terutama terhadap pengembangan unit usaha BUMDesa.
2. Dalam menargetkan pendapatan pada perencanaan anggaran pihak BUMDesa seharusnya lebih dahulu mengkalkulasi alokasi biaya yang dikeluarkan agar tidak terjadi pemborosan dalam pengelolaan keuangan. Mengingat Efisiensi dapat memaksimalkan penggunaan semua sumber daya yang ada sehingga tidak ada yang terbuang percuma.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, W.A., Putri, E.G. (2019). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Keuangan Desa/Nagari Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas,Vol. 2(2), Hal: 166–181.

Bihamding, H. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa.Yogyakarta: Deepublish.

Depdagri.1997.Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management,16: 49-64.

Griffin, R.W. (1990) Management – 3rd Edition, Houghton Mifflin company, Part III

Kadang, B.S Laloma,A.,& Deysi Tampongangoy.(2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. Jurnal Administrasi Publik,Vol. 7(103).

Kusrawan, K. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe.Jurnal GeoEkonomi, Vol. 12(1), Hal: 25-37.

Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UUP STIM YKPN

Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerha. Yogyakarta: Andi

Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Mustofa. (2021). Kerap Merugi, PAM Desa Paksebali Justru Untung Saat Pandemi.https://radarbali.jawapos.com/ekonomi/24/05/2021/kerap-merugi-pam-desa-paksebali-justru-untung-saat-pandemi.(diakses pada 16 November 2021).

Novelino, Andry.2021. Kemendes Klaim Tak Ada Desa Tertinggal Di Bal. Jakarta: CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210408164430-92-627581/kemendes-klaim-tak-ada-desa-tertinggal-di-bali. (diakses pada 31 Desember 2021).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Suputra, M.E. (2020). Banyak Bermasalah, 2021 Inspektorat Klungkung Fokus Benahi Tata Kelola BUMDes. Tribun-Bali.com; Tribun-bali.com. https://bali.tribunnews.com/2020/12/21/banyak-bermasalah-2021-inspektorat-klungkung-fokus-benahi-tata-kelola-bumdes

Susanti, E., Lestari, A. (2022). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Aeeropa Di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, Vol. 5(3).

Sutardjo, Kartohadikusumo, 1953, Desa, Yogyakarta : Indonesia Monographs.

Tenda, A.C., Mangindaan, V.J., Punuindoong, Y.A. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Desa Tournelet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Productivity, Vol. 3 (2) Hal: 162-167

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Waseso, R. (2021). Sebanyak 35% BUMDes di Indonesia terdampak pandemi Covid-19.Kontan.co.id;www.kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-35-bumdes-di-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19. (Diakses pada 31 Desember 2021)